

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2011, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Mappiare, 2011, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Yesmil dan Andang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Rafika aditama.
- Anwar, Yesmil dan Andang, 2008, *Pengantar Sosiologi dan Hukum*, Jakarta: Gramedia
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- R. Sunarto Soerodibroto, 2011, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Santi Kusumaningrum, 2001, *Perkembangan Manusia*, Jakarta: Gramedia.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Matreuil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Garis-garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No. 11 MPR 1988. Bahan Penataran P4 Seratus Jam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

C. LAIN-LAIN

<https://www.tirto.id/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 12:43 WIB.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 20-Oktober-2023, Pukul 18.46 WIB).

<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, di akses 20 Oktober 2023.

Karya Ilmiah Remaja. 2014, *Contoh Karya Ilmiah Pengaruh Geng Motor*:
<https://bangzekk77.blogspot.com/2014/04/contoh-karya-ilmiah-pengaruh-geng-motor.html> di akses 15 Oktober 2023.

BIODATA: dampak negatif geng motor (ameliamaulinda2002.blogspot.com):
<https://ameliamaulinda2002.blogspot.com/2016/04/dampak-negatif-geng-motor.html> di akses 15 Oktober 2023.

Sari, Y. (2014). Persepsi Siswa tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Pekanbaru: UIN Riau.

Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.

Wawancara Bersama Bripda Rama S.H. tanggal 18 Januari 2024 di Polrestabes Surabaya

Wawancara Bersama Aiptu Yuli L. S.H. tanggal 23 Januari 2024 di Polrestabes Surabaya